STRUKTUR PROGRAM PELATIHAN

NAMA : PELATIHAN CALON PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
KODE : F.K.D. 01
KOMPETENSI : Menerapkan kebijakan tentang produk halal

NO	TAHAPAN PELATIHAN	MATA PELATIHAN		JAM PELATIHAN
I	*In The Job Training I*	**A**	**KELOMPOK DASAR**	
		1.	Pembangunan Bidang Agama	3
		2.	Nilai-Nilai Dasar SDM Kementerian Agama	3
		3.	Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Kementerian Agama	3
			Jumlah	**9**
		B	**KELOMPOK INTI**	
		1.	Peraturan Perundang-Undangan Produk Halal	4
		2.	Produk Halal Menurut Syariat Islam	4
		3.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	4
		4.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal	8
		5.	Registrasi Sertifikasi dan Label Halal	8
		6.	Sistem Jaminan Halal	8
		7.	Kebijakan BPOM tentang Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB)	8
			Jumlah	**44**
		C	**KELOMPOK PENUNJANG**	
		1.	*Overview*	1
		2.	*Building Learning Commitment*	3
		3.	Evaluasi Program	1
		4.	Rencana Tindak Lanjut	1
		5.	Ujian	1
			Jumlah	**7**
		Total IJT – I		**60**
I	*On The Job Training*	1	*In House Training* ke Tempat Pengujian Produk Halal	15
		2	*In House Training* ke Produksi makanan yang telah bersetifikat	15
			Total OJT	**30**
III	*In The Job Training II*	1	Bimbingan Persiapan Presentasi	5
		2	Presentasi	5
			Total IJT – II	**10**
			TOTAL	**100**

NO. DOKUMEN	NO. REVISI
PT-PM-FKD-01	01

SILABUS PELATIHAN

NAMA : PELATIHAN CALON PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL
KODE : S.K.D. 01
KOMPETENSI : Menerapkan kebijakan tentang produk halal

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
IJT-1							
	A.	**KELOMPOK DASAR**					
	1.	Pembangunan Bidang Agama	3	Memahami peran pemerintah dalam pelayanan umat beragama	1.1 Menjelaskan tugas Kementerian Agama 1.2 Menjelaskan fungsi Kementerian Agama 1.3 Membedakan konsep moderasi, intoleran dan radikalisme dalam konteks kerukunan umat beragama 1.4 Memberikan contoh moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat	1. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama 2. Moderasi Beragama 3. Intoleransi dan Radikalisme	1. Moderasi Beragama Kementerian Agama (Kementerian Agama) 2. Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme di Indonesia (Suhardi Alius, Gramedia)
	2.	Nilai-Nilai Dasar SDM Kementerian Agama	3	Memahami konsep revolusi mental, konsep ikhlas beramal, lima nilai budaya kerja, dan kode etik pegawai Kementerian Agama	2.1 Mendeskripsikan nilai-nilai revolusi mental dalam kehidupan 2.2 Menjelaskan wawasan kebangsaan 2.3 Menjelaskan konsep ikhlas beramal	1. Revolusi Mental: a. Integritas b. Etos kerja c. Gotong royong 2. Wawasan Kebangsaan 3. Konsep Ikhlas Beramal	1. Revolusi Pancasila (Yudi Latif, Mizan) 2. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan Bangsa. (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI)

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
					2.4 Memberikan contoh lima nilai budaya kerja di tempat kerja 2.5 Menjelaskan kode etik pegawai Kementerian Agama	4. Lima Nilai Budaya Kerja 5. Kode etik pegawai Kementerian Agama	3. Buku Saku Nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama
	3.	Sistem Pelatihan dan Pengembangan SDM Kementerian Agama	3	Memahami urgensi pelatihan dalam pengembangan kompetensi, diversifikasi penyelenggaraan dan penjaminan mutu pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan	3.1 Menjelaskan urgensi pelatihan dalam pengembangan kompetensi pegawai 3.2 Memberikan contoh jenis-jenis penyelenggaraan pelatihan 3.3 Mendeskripsikan konsep penjaminan dan peningkatan mutu pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan	1. Urgensi pelatihan dalam pengembangan kompetensi 2. Diversifikasi/jenis-jenis penyelenggaraan pelatihan 3. Penjaminan dan peningkatan mutu Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	1. PERLAN Nomor 10 Tahun 2018 2. SK Kaban Nomor 685 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
		Jumlah A	9				
	B.	**KELOMPOK INTI**					
	1.	Peraturan Perundang-undangan Produk Halal	6	Menganalisis peraturan perundang-undangan produk halal	1.1. Menjekaskan pengertian peraturan perundang-undangan produk halal 1.2. Menunjukan peraturan perundang-undangan produk halal	Peraturan perundang-undangan produk halal 1. Pengertian peraturan perundang-undangan produk halal 2. Urgensi peraturan perundang-undangan produk halal 3. Perkembangan peraturan	Undang-Undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
					1.3. Menjelaskan urgensi peraturan produk halal 1.4. Menunjukan contoh-contoh kasus manfaat produk halal 1.5. Menjelaskan perkembangan peraturan perundang-undangan produk halal 1.6. Menganalisis pelaksanaan perundangan-undang an produk halal	perundang-undangan produk halal	
	2.	Produk Halal Menurut Syariat Islam	6	Memahami konsep produk halal menurut syariat Islam	2.1. Menjelaskan produk halal menurut syariat Islam 2.2. Menunjukan dalil-dalil produk halal dalam syariat Islam 2.3. Menjelaskan perlindungan konsumen dalam produk halal 2.4. Menjelaskan urgensi produk halal menurut syariat Islam 2.5. Menunjukan contoh-contoh produk halal dan produk tidak halal	Produk halal menurut syariat Islam 1. Konsep dasar produk halal menurut syariat Islam 2. Urgensi produk halal menurut syariat Islam	1. Dr. Qardawi, Yusuf, 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu. 2. Wajdi, Farid ,2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi*, Jakarta: RajaGrafindo

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
	3.	Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal	6	Mampu melaksankan pembinaan dan pengawasan produk Halal	3.1. Menjelaskan pengertian pembinaan dan pengawasan 3.2. Menjelaskan dasar hukum pembinaan dan pengawasan produk halal 3.3. Menjelaskan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah 3.4. Menjelaskan pembinaan dan pengawasan oleh MUI 3.5. Menjelaskan pengawasan oleh auditor	1. Pembinaan dan pengawasan produk halal a. Dasar hukum pembinaan dan pengawasan produk halal b. Pembinaan produk halal: 2. Pembinaan oleh pemerintah 3. Pembinaan oleh MUI 4. Pengawasan produk halal a. pengawasan oleh auditor b. Pengawasan oleh pemerintah	Wajdi, Farid ,2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
	4.	Prosedur, Penetapan Fatwa Halal	6	Memahami prosedur dan penetapan fatwa halal	4.1. Menjelaskan pengertian fatwa halal 4.2. Menunjukan contoh-contoh fatwa halal dan implementasinya 4.3. Menjelaskan fatwa halal melalui prosedur akademis 4.4. Menjelaskan fatwa halal melalui administrasi	Prosedur penetapan fatwa halal a. Prosedur akademis penetapan fatwa halal b. Prosedur administrasi penetapan fatwa halal	Wajdi, Farid ,2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
	5.	Registrasi Sertifikasi dan Label Halal	8	Mempu melakukan registrasi sertifikasi dan lebel halal	5.1. Menjelaskan pengertian registrasi halal 5.2. Menjelaskan pengertian sertifikasi halal 5.3. Menjelaskan pengertian lebel halal 5.4. Menunjukan lembaga registrasi, sertifikasi dan label halal dan tupoksinya 5.5. Menjelaskan cara memperoleh registrasi halal 5.6. Menjelaskan cara memperoleh sertifikasi halal 5.7. Menjelaskan cara memperoleh label halal 5.8. Mensimulasikan pelaksanaan registrasi, sertifikasi dan label halal	Registrasi, sertifikasi dan label halal 1. pengertian registrasi, sertifikasi dan label halal 2. Lembaga rigestrasi, sertifikasi dan label halal 3. Prosedur dan tata cara memperoleh registrasi, sertifikasi dan label halal	Wajdi, Farid ,2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
	6.	Sistem Jaminan Halal	8	Memahami sistem jaminan halal	6.1. Menunjukan lembaga yang berwenang dalam penetapan halal 6.2. Menjelaskan struktur organisasi dalam penetapan fatwa halal	Sistem jamnan halal 1. lembaga berwenang penetapan halal 2. struktur oranisasi dalam penetapan fatwa halal	1. Wajdi, Farid ,2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2. Muhamad Bin Salih Al Utsaimin, 2014. Halal dan

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
					6.3. Menjelaskan tupoksi dari struktur organisasi dalam penetapan fatwa halal 6.4. Menjelaskan peran MUI dalam penetapan jaminan hala 6.5. Menjelaskan prosedur perpanjangan labelisasi halal 6.6. Mensimulasikan prosedur perpanjangan labelisasi halal	3. Peran MUI dalam penetapan jaminan halal 4. Prosedur perpanjangan labelisasi halal	Haram dalam Islam, Jakarta: Penerbit Ummul Qura.
	7.	Kebijakan BPOM tentang Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB)	6	Menunjukan cara produksi makanan yang baik (CPMB) dalam kebijakan BPOM	7.1. Menjelaskan strategi dan cara produksi makanan yang baik dalam kebijakan BPOM 7.2. Menjelskan cara mensosialisasikan strategi dan cara produksi makanan yang baik dalam kebijakan BPOM 7.3. Menjelaskan pelayanan minimal (SPM) produksi makanan halal 7.4. Menunjukan rambu-rambu penyusunan standar	Kebijakan BPOM tentang cara produksi makanan yang baik (CPMB). 1. Mensosialisasikan strategi dan Cara produksi makanan yang baik 2. Rambu-rambu penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) tentang cara produksi makanan yang baik.	1. Wajdi, Farid ,2019.*Jaminan Produk Halal di Indonesia*, *Urgensi Sertifikasi dan Lebelisasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada 2. Muhamad Bin Salih Al Utsaimin, 2014. Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta: Penerbit Ummul Qura.

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
					pelayanan minimal (SPM) produksi makanan halal		
		Jumlah B	34				
	C.	**KELOMPOK PENUNJANG**					
	1.	*Overview*	1	Memahami target dan cara mencapai kompetensi pelatihan	1.1. Menyebutkan kompetensi yang harus dicapai pasca pelatihan 1.2. Menyebutkan tata tertib 1.3. Menyebutkan hak dan kewajiban peserta 1.4. Menguraikan langkah-langkah pencapaian target kompetensi pelatihan 1.5. Menjelaskan proses penilaian dan kelulusan peserta	1. Target output pelatihan 2. Tata tertib pelatihan 3. Hak dan kewajiban peserta pelatihan 4. Tahapan-tahapan kegiatan pelatihan 5. Proses penilaian dan kelulusan atau ketuntasan pelatihan	1. SK Kabadan Nomor 685 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidkan dan Pelatihan. 2. SK Kabadan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
	2.	*Building Learning Commitment*	3	Memahami cara mengenali diri sendiri dan orang lain	2.1. Menjelaskan konsep diri 2.2. Menjelaskan *experiential learning cycle* 2.3. Menyusun komitmen belajar	1. Konsep diri 2. *Experiential Learning Cycle* 3. Komitmen *belajar*	Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), 2003. *Building Learning Commitment,* Jakarta.
	3.	Rencana Tindak Lanjut	1	Menyusun rancangan program yang akan dilaksanakan pasca pelatihan	3.1. Menjelaskan langkah penyusunan rencana tindak lanjut	Rencana Tindak Lanjut	1. SK Kabadan Nomor 685 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
					3.2. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pasca pelatihan		Penyelenggaraan Pendidkan dan Pelatihan. 2. SK Kabadan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
	4.	Evaluasi Program	1	Mengevaluasi program pelatihan	4.1. Melaksanakan penilaian kepada peserta 4.2. Melaksanakan penilaian kepada panitia 4.3. Melaksanakan penilaian kepada widyaiswara	Evaluasi Program	1. SK Kabadan Nomor 685 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidkan dan Pelatihan. 2. SK Kabadan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Teknis Pendidikan dan Kegamaan
	5.	Ujian	1	-	-	-	-
		Ujian	1				
		Total IJT-1	**50**				
OJT							
	1	1. In House Training ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) 2. In House Training ke Produksi makanan yang telah bersetifikat	15	Menerapkan pengetahuan tentang pengawasan produk halal	1. Menyusun langkah pengawasan produk halal 2. Mengodentifikasi problematika dalam	Pengawasan produk halal	1. In House Training ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) 2. In House Training ke Produksi makanan yang telah bersetifikat

TAHAP	NO	MATA PELATIHAN	JP	KOMPETENSI MATA PELATIHAN	INDIKATOR	MATERI POKOK/ SUB MATERI POKOK	DAFTAR PUSTAKA/ REFERENSI
					pengawasan produk halal		
	2	Presentasi Hasil	15	Menyusun hasil untuk dipresentasikan	Presentasi hasil dan RTL	Presentasi	
		Total OJT	**30**				
IJT-2							
	1	Bimbingan Persiapan Presentasi	5	-	-	-	-
	2	Presentasi	5	-	-	-	-
		Total IJT-2	**10**				
		Total In-On-In	**100**				

Jakarta, Februari 2020
Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis
Pendidikan dan Keagamaan

Mahsusi